

KEPENTINGAN CINA MENYETUJUI PEMIMPIN JAISH E MOHAMMED MASUK DALAM DAFTAR TERORIS GLOBAL MEI 2019

Orinda Aprillia¹

Abstract: This research aims to explain China's interest in approving decision which put the leader of Jaish E Mohammed into the list of global terrorist in May 2019. National Interest Theory is used to analyze the interest. It is a qualitative-descriptive research with secondary data which are collected from books, journals, and mass media. The results shows that China's interests are based on its economic and world order interest. At that time, China, which was involved in various economic cooperation with India, was worried that it would lose its market if it maintained its initial decision. China also has world order interest as one of the permanent members of the United Nations Security Council whose task is to maintain world security stability. Thus, continuing to reject India's proposal to include JeM Leader, Masood Azhar, on the global terrorist list could adversely affect its position on the United Nations Security Council.

Keywords: China's interest, Jaish E Mohammed, global terrorist

Pendahuluan

Sebagai salah satu isu internasional, upaya melawan terorisme membutuhkan kerjasama lintas negara karena mengancam stabilitas dan perdamaian global. Kelompok teroris yang berada di sebuah negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam negeri, namun juga negara lain. Hal ini tergambar dengan jelas pada kasus Jaish E Mohammed (JEM) yang bermarkas di Pakistan. Kelompok separatis yang dipimpin oleh Masood Azhar ini didirikan pada tahun 2000. Sebelumnya, pada tahun 1994 Azhar menjabat sebagai sekretaris Jendral di kelompok Harakat Ul Mujahidin (HUM) yang merupakan salah satu kelompok teroris yang berada di wilayah Pakistan dan telah dikaitkan dengan Al Qaeda.

Kemunculan kelompok separatis ini tidak lepas dari konflik wilayah yang terjadi antara India dan Pakistan atas perebutan wilayah Kashmir. Konflik berkepanjangan ini bermula pada tahun 1947 ketika masing-masing negara mengklaim Kashmir sebagai wilayah kekuasaannya. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir antara India dan Pakistan diperparah dengan munculnya kelompok-kelompok yang muncul di wilayah Kashmir yang menginginkan adanya perubahan status dalam Kashmir. Periode awal 1990 muncul tiga jenis kelompok dalam masyarakat Kashmir yang memiliki persepsi berbeda mengenai masa depan Kashmir, kelompok itu adalah kelompok yang menginginkan Kashmir tergabung dengan India, kelompok yang menginginkan Kashmir tetap merdeka, serta kelompok terakhir yang menginginkan Kashmir tetap menjadi bagian dari Pakistan. Diantara ketiga kelompok di atas yang muncul di wilayah Kashmir, muncul Jaish E Mohammed yang menginginkan Kashmir menjadi bagian dari wilayah Pakistan, namun yang membedakan JeM dengan kelompok lainnya adalah JeM memiliki jaringan dengan teroris-teroris global seperti Harakat Ul Mujahidin (HUM) dan Al-Qaeda.

Dilihat dari awal tujuan terbentuknya JeM mereka berangkat sebagai kelompok separatis karena JeM dibentuk dengan tujuan untuk memisahkan Kashmir dari pemerintahan India, serangannya pun hanya ditujukan untuk melemahkan kekuatan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: orinda28@gmail.com

militer India di Kashmir, namun JeM kemudian dikategorikan sebagai kelompok teroris di bawah Resolusi 1267 yang dikeluarkan oleh DK PBB. (Ankit, 2019) Keputusan ini dibuat pada 17 Oktober 2001 setelah menemukan bahwa JeM “terlibat dalam upaya pendanaan, perencanaan, memfasilitasi, mempersiapkan, atau melakukan tindakan atau aktivitas bersama dengan, atas nama, atau mendukung, memasok, menjual atau mentransfer senjata dan material terkait ke atau jika tidak, mendukung kegiatan Al-Qaida”. (United Nation, 2001)

Diberlakukannya sanksi 1267 kepada JeM tidak serta merta menghentikan serangan yang dilakukan JeM hal itu terjadi karena Masood Azhar sebagai pemimpin JeM masih memiliki keleluasaan untuk bergerak, mendapatkan sumber dana dan memperoleh pasukan senjata guna memperbarui anggota jaringan hal ini yang membuat India kemudian mengajukan proposal pada DK PBB untuk memasukkan Masood Azhar ke dalam daftar teroris global. Upaya yang dilakukan oleh India untuk mendaftarkan Masood Azhar sebagai teroris global di DK PBB dibawah ketentuan komite sanksi nomor 1267 dilakukannya sejak tahun 2009, 2016, 2017 dan 2019.

Namun pengajuan proposal yang diusungkan oleh India dibantu dengan Amerika, Inggris dan Perancis mendapat penolakan dari Cina. Tetapi, tepat pada 1 Mei 2019 Cina akhirnya menyetujui Masood Azhar masuk ke dalam daftar teroris global dibawah ketentuan sanksi 1267 DK PBB. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan kepentingan China dibalik persetujuannya untuk memasukkan Masood Azhar dalam daftar teroris global Mei 2019.

Kerangka Teori

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan dasar suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain dan merupakan tujuan yang ingin dicapai berhubungan dengan kebutuhan negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Peran suatu negara dalam merumuskan kepentingan nasionalnya akan menjadi pertimbangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain sesuai dengan kebijakan luar negerinya. (Sitepu, 2011) Dengan demikian konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dan menjadi awal pembentukan kebijakan luar negeri.

Donal E. Neuechterlin mengemukakan ada empat dasar kepentingan nasional yang melandasi hubungan antar kedua negara atau lebih, yaitu: (Nuechterlein, 1976)

1. Security interest

Security interest atau kepentingan keamanan adalah kepentingan yang menyangkut masalah perlindungan penduduk, wilayah teritorial, dan otonomi politiknya dari ancaman negara lain terhadap sistem pemerintahan.

2. Economic Interest

Economic interest atau kepentingan ekonomi adalah kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Kepentingan ini dilakukan untuk meraup laba dan menciptakan atau membuat modal atau sebagai investor yang bisa membantu warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dimana sumber daya yang disediakan bisa dimanfaatkan sebijaksana mungkin dengan cara melakukan transaksi bisnis internasional atau interaksi internasional lainnya.

3. World Order Interest

World order interest atau kepentingan tata internasional diartikan bahwa adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan, dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar negeri dengan aman.

4. Ideological Interest

Ideological interest atau kepentingan ideologi, yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Empat dasar kepentingan nasional ini kemudian harus dianalisis intensitasnya sehingga dapat menjelaskan penyebab perilaku sebuah negara di dalam menelurkan keputusan dan kebijakan luar negerinya. Untuk menganalisis proses penentuan intensitas Nuechterlein merumuskan intensitas kepentingan (*Intensity of Interest*) ke dalam empat kategori, yaitu *survival*, *vital*, *major*, dan *peripheral*.

Survival issues atau kritis: kunci apakah suatu masalah termasuk dalam *survival issue* atau bukan adalah adanya ancaman fisik dari negara lain. Ketika keberadaan suatu negara dalam bahaya akibat dari serangan militer secara langsung di wilayahnya sendiri, atau ancaman serangan dari negara lain. Melalui definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hanya kepentingan keamanan lah yang dapat memenuhi kategori tingkatan kritis, sedangkan kepentingan ekonomi, kepentingan tata dunia, dan kepentingan ideologi tidak dapat mencapai pada tingkatan kritis. Lebih jelasnya, inilah kepentingan paling mendasar suatu negara.

Vital issues atau berbahaya: intensitas berbahaya adalah keadaan dimana suatu keadaan lingkungan yang dapat membahayakan negara yang hanya dapat dihilangkan atau ditanggulangi melalui pengambilan tindakan-tindakan yang keras, termasuk penggunaan kekuatan militer. Namun tidak seperti intensitas kritis, permasalahan intensitas berbahaya tidak hanya mencakup pertahanan dan keamanan, melainkan ekonomi, tata dunia, dan ideologi. Situasi berbahaya yang tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ancaman yang lebih berbahaya sehingga intensitas kepentingannya dapat berubah menjadi kritis.

Major issues atau serius: di mana kesejahteraan politik, ekonomi dan ideologis negara dapat dipengaruhi oleh peristiwa dan tren di lingkungan internasional dan karenanya diperlukan tindakan untuk mencegahnya berkembang menjadi masalah vital. Sebagian besar masalah dalam hubungan internasional termasuk dalam kategori ini dan biasanya diselesaikan melalui negosiasi diplomatik. Ketika pembicaraan diplomatik gagal menyelesaikan perselisihan, hal tersebut bisa menjadi berbahaya. Pemerintah kemudian harus memutuskan seberapa dalam kepentingan mereka dipengaruhi oleh peristiwa atau tren yang dipertanyakan; Dalam analisis akhir, pemerintah tidak mau atau tidak dapat berkompromi dengan apa yang dianggapnya sebagai pertanyaan mendasar.

Peripheral issues: di mana kesejahteraan negara tidak terpengaruh oleh peristiwa atau tren di luar negeri, namun kepentingan warga negara dan perusahaan swasta yang beroperasi di negara lain menjadi tanggung jawab negara tersebut. Jelas, perusahaan multinasional biasanya diberi prioritas lebih tinggi oleh negara karena pendapatan dan pajak mereka memiliki efek signifikan pada kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Setiap negara menetapkan prioritasnya sendiri pada seberapa besar nilai perusahaan komersial yang beroperasi di luar negeri: bagi beberapa negara, ini merupakan masalah besar bagi kepentingan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menguraikan alasan Cina mengubah keputusannya; semula menolak nama Masood Azhar untuk dimasukkan ke dalam daftar teroris global hingga akhirnya di bulan Mei 2019 proposal tersebut disetujui. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data jenis sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan data-data lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Konflik India – JEM di Kashmir

Sejak awal berdirinya India dan Pakistan, wilayah Kashmir memang telah lama diperebutkan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan klaim di mana Pakistan menganggap mayoritas masyarakat Muslim di Kashmir lebih dekat dengan negaranya, sementara itu pemerintah Kashmir justru didominasi oleh golongan umat Hindu. Meski sempat menjadi wilayah yang merdeka, Maharaja Hari Singh, pemimpin Kashmir akhirnya menandatangani *Instrument of Accession* yang menyatakan bergabungnya wilayah Kashmir dengan India. Keputusan ini didorong oleh pemberontakan yang pecah pada Oktober 1947 antara masyarakat sipil dengan golongan pemerintahan. Konflik ini kemudian mereda setelah PBB turun tangan dan mengeluarkan resolusi S/726/1948 yang berisi gencatan senjata, penetapan garis demarkasi, serta demiliterisasi negara Jammu-Kashmir dan Plebesite yang dilakukan bebas dan tidak memihak dibawah pengawasan PBB. (Council S. , 1948) Akan tetapi, situasi ini tidak berlangsung lama karena situasi kembali menegang akibat ulah beberapa kelompok teror. Salah satu yang paling menonjol dan besar adalah Jaish E Mohammed (JEM).

JEM didirikan oleh Maulana Masood Azhar. Maulana Masood Azhar adalah seorang pemimpin mujahidin Pakistan. Azhar pernah bergabung dengan berbagai kelompok teroris, salah satunya kelompok Harkat Ul Mujahidin (HUM) yang merupakan salah satu gerakan terorisme yang berada di wilayah Pakistan dan telah dikaitkan kedekatan hubungannya dengan Al-Qaeda. Azhar kemudian menjabat sebagai sekretaris Jendral di Harkat Ul Mujahidin. Selepas dari HUM, Azhar lalu mendirikan JEM di tahun 2000. Semenjak berdirinya, JEM menjadi kelompok teroris yang telah melakukan serangan yang aktif di wilayah Kashmir. Dampak dari serangan-serangan ini cukup besar dan meresahkan stabilitas India sehingga akhirnya India melakukan beragam upaya untuk tidak hanya menghentikan JEM tapi juga memasukkan nama Masood Azhar ke dalam daftar teroris global. (Noor, 2016)

B. Upaya Internal dan Eksternal yang Dilakukan India

Untuk mengatasi permasalahan ini, India melakukan dua bentuk usaha yakni secara internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan India berada di bawah kerangka hukum *Unlawful activities (prevention) Act* (UAPA) tahun 1967 dan *SAARC Convention on Suspression of Terrorism Act* tahun 1993 serta undang-undang negara bagian lainnya. Kapabilitas penanggulangan terorisme juga diserahkan dibawah *Central Bureau Investigation, The National Security Guard, dan The National Investigation Agency*. Guna meminimalisir radikalisme pemerintah India telah mengawasi peredaran informasi di sosial media dan internet. Pemerintah India berupaya mengantisipasi perekrutan, radikalisme dan upaya menimbulkan kekacauan yang dilakukan oleh kelompok teroris dengan menggunakan media sosial. (Yunanto, 2017).

India juga melibatkan badan intelijen, militer, dan organisasi polisi, termasuk pasukan kepolisian yang dikelola oleh negara bagian, pasukan keamanan khusus untuk mengawal bandara dan tempat-tempat umum lainnya, dan kekuatan paramiliter untuk mengawal perbatasan dan membantu kepolisian jika diperlukan, India memiliki striking force berupa pasukan khusus yang bernama *National Security Guard* (NSG) satuan ini dibentuk mengikuti satuan GSG9 Jerman, yang terbagi menjadi dua grup, yaitu *Special Action Grup* (SAG) dan *Special Ranger Grup* (SRG). Dalam Satuan SAG, 54% anggotanya diambil dari pasukan tempur elit dan semua anggotanya diambil dari Angkatan Darat India. Sementara itu, anggota-anggota SRG terdiri dari perwakilan dari organisasi kepolisian pusat seperti *Central Reserve Defence Police* (CRDF) , *Border Security Force* (BSF). Fungsi utamanya adalah untuk memainkan peran dalam mendukung ke SAG di wilayah sasaran, terutama untuk mengisolasi sasaran. Mereka dilatih secara militer dan dikondisikan untuk “selalu siap menyerang.” Pasukan khusus militer ini paling aktif bergerak di wilayah-wilayah tertentu, seperti Jammu dan Kashmir yang memang wilayah konflik. India juga memaksimalkan kinerja *National Intelligence Grid* (NATGRID) yang akan mengalami beberapa pembaharuan seperti NATGRID akan memiliki data yang terintegrasi dengan keluar dan masuknya individu yang melewati keimigrasian India, transaksi perbankan dan keuangan, pembelian kartu kredit, telekomunikasi, data pajak masing-masing individu, dan lain-lain. NATGRID juga akan terintegrasi dengan semua lembaga di pemerintahan untuk keperluan pendataan yang dapat diakses secara *real-time*. (Iqbal, 2020)

Selain mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk penanganan kasus terorisme, India juga menekan Pakistan untuk bekerjasama mengatasi permasalahan JEM karena lokasi markas kelompok tersebut berada di daerah Pakistan. Untuk itu, pada tahun 2002, kelompok investigasi khusus didirikan oleh Pakistan yang bekerja sama dengan departemen kepolisian pusat dan perbatasan sebagai upaya Pakistan untuk melawan gerakan terorisme sesuai dengan Pasal 11-E UU anti terorisme, begitu sebuah kelompok atau organisasi itu dilarang, keuangannya harus dibekukan, sumber dana dan penyebarannya dilarang. (Mahendra, 2002)

Tidak cukup dengan usaha dalam negeri, pada tahun 2001 PBB juga telah menetapkan JEM sebagai kelompok teroris berdasarkan Resolusi 1267 yang dikeluarkan Dewan Keamanan (DK) PBB. Akan tetapi, penetapan tersebut rupanya tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dari tindak tanduk JEM. Karena itu, India akhirnya mengajukan nama Masood Azhar agar masuk ke dalam daftar teroris global dalam Resolusi 1267 kepada DK PBB. Pengajuan ini dilakukan pada tahun 2009 yang berisi sanksi yang harus dijatuhkan pada Masood Azhar, antara lain: larangan bepergian, pembekuan asset, serta embargo senjata. Namun, Cina menggunakan hak vetonya sebagai negara anggota tetap DK PBB dan menolak proposal tersebut karena alasan teknis. Usaha India tidak berhenti di situ, India kembali memperjuangkan draf proposal tersebut dan mendaftarkannya kembali ke DK PBB pada Februari 2016. Pasca serangan yang terjadi di Pathankot, India kemudian dibantu dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk mengajukan proposal yang kedua dengan menunjuk Azhar sebagai daftar teroris global. Akan tetapi, pada bulan April proposal ini ditolak oleh Cina dengan alasan Azhar tidak masuk kualifikasi untuk dikategorikan sebagai teroris yang harus menghadapi sanksi dari Resolusi 1267. (Times, 2019)

Usaha dilanjutkan kembali pada Januari 2017. Kali ini, proposal tersebut dimasukkan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis ke DK PBB. Ketiga negara tersebut menuntut Cina agar dapat menyetujui pengajuan proposal Azhar namun Cina

menolak dan mengatakan belum ada kelengkapan berkas yang dapat menetapkan Azhar sebagai daftar teroris global. Cina akhirnya memberlakukan penundaan dengan alasan teknis untuk proposal tersebut selama 6 bulan. Tindakan ini kemudian dilanjutkan oleh Cina di bulan Agustus 2017 dengan memperpanjang masa penundaan selama 3 bulan lamanya sebelum akhirnya melakukan penolakan terhadap draf tersebut. (Elizabeth, 2019)

Usaha dilanjutkan kembali pada Januari 2017. Kali ini, proposal tersebut dimasukkan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis ke DK PBB. Ketiga negara tersebut menuntut Cina agar dapat menyetujui pengajuan proposal Azhar namun Cina menolak dan mengatakan belum ada kelengkapan berkas yang dapat menetapkan Azhar sebagai daftar teroris global. Cina akhirnya memberlakukan penundaan dengan alasan teknis untuk proposal tersebut selama 6 bulan. Tindakan ini kemudian dilanjutkan oleh Cina di bulan Agustus 2017 dengan memperpanjang masa penundaan selama 3 bulan lamanya. India bersama Amerika, Inggris dan Perancis kembali mengajukan proposal untuk yang keempat kalinya pada tanggal 23 Februari 2019, mereka mengutuk serangan yang terjadi akibat perbuatan JEM di Pethankot, empat anggota tetap DK PBB dan sepuluh anggota tidak tetap DK PBB menyetujui pengajuan proposal India terkait Azhar, tetapi pada 13 Maret 2019 Cina kembali menolak pengajuan proposal India. Cina menyatakan membutuhkan waktu untuk mempelajari jenis sanksi terhadap Masood Azhar. India memandang penolakan yang dilakukan oleh Cina terkait pengajuan proposal nya di DK PBB terkait kedekatan hubungan antara Cina dan Pakistan (Hindu, 2019).

Kerjasama antara Cina dan Pakistan sudah terjalin sejak tahun 1950, berawal dari ketertarikan geografis antara keduanya dan berujung ke masalah keamanan. Cina sebagai negara maju sangat diharapkan oleh Pakistan untuk membantu perekonomian di negaranya. Pada kenyataannya, Cina memang menjadi salah satu negara yang konsisten membantu Pakistan terutama dalam membangun infrastruktur dalam negeri. Salah satunya adalah proyek pembangunan Pelabuhan Gwardar. Cina merupakan salah satu investor utama dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Pada tahun 2013 Pakistan bahkan menyerahkan pengelolaan operasional pembangunan Gwardar kepada Cina. Sebelumnya pelabuhan ini dikelola oleh *Port Of Singapore Authority* lalu akhirnya diserahkan kepada *China Overseas Holdings*. (Saif, 2013)

C. Perubahan Keputusan Cina

Ada dua kepentingan yang membuat Cina akhirnya mengubah keputusannya, yakni adanya kepentingan ekonomi dan tata dunia internasional.

1. Kepentingan Ekonomi

India adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Cina sejak 2004, Kepentingan ekonomi yang dijalankan oleh Cina di India tidak terlepas karena Cina menginginkan adanya pembukaan pasar bagi barang-barang hasil produksinya untuk meningkatkan perekonomiannya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina mendorong mereka melakukan ekspansi pasar besar-besaran . Pada tahun 2004, India merupakan salah satu diantara 20 mitra dagang teratas Cina, urutan kelima belas di bidang impor, dan urutan ke delapan belas di bidang ekspor. India adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Cina sejak 2004, berada pada peringkat lima besar dalam hubungan perdagangan, urutan kedua impor, dan urutan ketiga ekspor. Rincian perdagangan India dengan Cina, dari perspektif India, ditunjukkan pada table berikut dibawah ini : (Virmani, 2006).

Tabel 1. Hubungan perdagangan Cina dan India pada tahun 1996-2005

Tahun	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
Perdagangan (dalam miliar dollar)									
Ekspor ke Cina	0,6	0,7	0,4	0,5	0,8	1	2	3	5,3
Impor dari Cina	0,8	1,1	1,1	1,3	1,5	2	2,8	4,1	6,8
Perdagangan dengan Cina	1,4	1,8	1,5	1,8	2,3	3	4,8	7	12,1
Rata-rata pertumbuhan									
Ekspor	1,8%	2,1%	1,3%	1,5%	1,9%	2,2%	3,7%	4,6%	5,5%
Impor	1,9%	2,7%	2,6%	2,6%	3,0%	4,0%	4,3%	5,2%	6,2%

Sumber : India-China Economic Cooperation

Tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan hubungan kerjasama antara India dan India dalam bidang ekspor dan impor. Dikarenakan terjadi tensi ketegangan antara kedua negara akibat sikap Cina dalam menyikapi resolusi terkait pengajuan Masood Azhar di DK PBB. Akibat perlakuan Cina yang terus memblokir pengajuan proposal India di DK PBB, akhirnya sebagai bentuk protes akibat keputusan Cina, terjadi bentuk protes di masyarakat India, banyak pihak menyeru pemboikotan produk-produk dari Cina di media social domestik, masyarakat turun ke jalanan dan melakukan demonstrasi secara besar-besaran menolak keputusan yang dibuat oleh Cina. Sejumlah pengusaha India melalui *The Confederation of All India Traders (CAIT)* di mana lebih dari 70 juta pengusaha yang tergabung dalam CAIT dan merupakan salah satu organisasi yang memiliki pengaruh dalam pembangunan ekonomi di India, pun bergabung bersama-sama melakukan demonstrasi di India untuk mengajak para pengusaha untuk tidak menjual atau menggunakan produk buatan dari Cina. Dampak dari protes dan demonstrasi tersebut akhirnya terjadi penurunan permintaan impor India mencapai 8.87 miliar pada tahun 2019 hanya dalam waktu beberapa bulan. (In, 2019)

2. Kepentingan Tata Dunia

Pada tanggal 5 Maret 2019 Cina didesak oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Rusia terkait usulan pengajuan proposal India. Amerika Serikat menyatakan akan mengadakan rapat terbuka di DK PBB dan mengancam akan menggunakan “semua sumber daya yang tersedia” untuk memasukan Azhar ke dalam daftar teroris global. Dalam rapat terbuka yang dilaksanakan oleh DK PBB Cina harus menjelaskan sikapnya di hadapan negara-negara anggota tetap maupun tidak tetap, terkait keputusannya menolak pengajuan proposal India terkait Masood Azhar. Cina menyatakan solusi yang dilakukan oleh Amerika Serikat hanya akan memperumit masalah di DK PBB.

Sikap Cina membuat dunia internasional memandang bahwa Cina memiliki sikap yang tidak konsisten dalam menangani masalah terorisme, di satu sisi Cina menyerukan perlawanan terhadap penduduk Muslim di Uighur yang dianggap nya

sebagai terorisme untuk membenarkan sikapnya melawan rakyatnya dengan cara dimasukkan ke penjara dan kamp-kamp konsentasi. Namun di satu sisi Cina terus melindungi pemimpin Jaish E Mohammed. Kecaman keras ini terutama datang dari Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang pertama kali menyatakan perang terhadap terorisme. Ini disampaikan oleh Sekretaris Negara, Mike Pompeo pada bulan Maret 2019. ([TheWire, 2019](#))

Pada pertemuan DK PBB bulan Maret 2019 tersebut, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis menjadi tiga pengusul utama draf proposal untuk memasukkan nama Masood Azhar ke dalam daftar teroris global setelah sebelumnya hanya menjadi negara pendukung. Tindakan ini dipicu oleh langkah Cina yang terus menerus melakukan veto terhadap proposal India selama 10 tahun sebelumnya. Keterlibatan tiga negara anggota permanen DK PBB dalam pengajuan ini menjadi salah satu kunci desakan agar Cina segera menyetujui draf proposal tersebut. Tak hanya mereka, Rusia dan 10 anggota tidak tetap DK PBB yang lain pun turut menyetujui proposal tersebut. Setelah 10 tahun memperjuangkan draf proposal ini, Cina justru meminta DK PBB untuk menahan draf tersebut dengan alasan teknis. Keputusan Cina ini akhirnya mendorong Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk memberikan akomodasi permintaan Cina terkait masalah redaksional pada draf proposal selama tidak ada perubahan substansi, yakni: Masood Azhar ditetapkan sebagai salah satu teroris global. ([Times, Us, France and UK in intense discussion with China on Azhar Listing at UN, 2019](#))

JEM sendiri telah masuk ke dalam daftar kelompok teroris di bawah Resolusi 1267 yang dikeluarkan DK PBB. Namun, Masood Azhar sendiri belum masuk ke dalam daftar teroris global. Hal ini kemudian menyebabkan Masood Azhar masih bisa melakukan perjalanan dan serangan aksi teror. Implikasi dari absennya nama Masood Azhar juga berdampak pada perluasan jaringan dan pembaruan pendukung kelompok teror ini karena ia masih bisa melakukan pertemuan dengan jaringan kelompok teroris lainnya. Hal ini kontra-produktif dengan semangat kolektif negara-negara lain dalam memerangi terorisme terutama jaringan teroris yang saling memiliki keterkaitan.

Atas berbagai desakan dan pertimbangan, dan untuk menghindari kritik serta tindakan drastis yang lebih lanjut dari negara-negara lain dan PBB, Cina akhirnya mengubah keputusannya dan menyetujui draf proposal untuk memasukkan nama Masood Azhar ke dalam daftar teroris global. Keputusan ini dibuat oleh Cina pada bulan Mei 2019 setelah tidak memiliki keberatan terhadap draf proposal tersebut. Tindakan ini kemudian secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Masood Azhar sesuai dengan Resolusi 1267 yang berada di bawah pengawasan DK PBB.

Kesimpulan

Perubahan keputusan yang membuat Cina akhirnya merubah keputusannya terkait pengajuan proposal pemimpin JeM, Masood Azhar didasari oleh adanya kepentingan ekonomi dengan India dan kepentingan tata dunia. Hubungan ekonomi Cina dan India terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, permintaan impor India terhadap Cina mengalami peningkatan, sejak tahun 2014-2018 mencapai hingga \$76.87 Miliar, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan permintaan terhadap impor India di Cina, dikarenakan pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat India dan sejumlah pengusaha India yang tergabung dalam *The Confederation of All India Traders* (CAIT) melakukan pemboikotan terhadap produk-produk dari Cina. Reaksi yang ditunjukkan bukan hanya dilakukan oleh India, tetapi negara anggota yang tergabung dalam DK PBB. Adanya desakan dari anggota tetap dan tidak tetap DK PBB

menuntut Cina agar menyetujui pengajuan proposal terkait Masood Azhar. Mereka mempertanyakan sikap yang dilakukan Cina terhadap Masood Azhar yang bertolak belakang dengan semangat yang diusung DK PBB sebagai penjaga stabilitas keamanan dunia. Kedudukan Cina di dunia internasional pun mendapat perhatian karena Cina berusaha mencegah menjaga stabilitas keamanan internasional dengan melindungi teroris pemimpin Jaish E Mohammed. Intensitas permasalahan terorisme yang dibawa oleh Masood Azhar sebagai pemimpin JeM sudah tergolong sebagai isu vital yang jika dibiarkan berlarut bukan hanya mengancam India namun juga stabilitas tata dunia. Penolakan proposal pengajuan dimasukkannya nama Masood Azhar ke dalam daftar teroris global oleh Cina membuat pandangan internasional meyakini bahwa Cina telah melindungi pemimpin JeM, Masood Azhar tersebut. Hal ini menimbulkan desakan yang bertubi-tubi dari anggota DK PBB yang lainnya. Jika tidak diatasi segera, maka akan berpengaruh dengan keadaan politik dan ekonomi Cina di dunia, termasuk dalam hubungan kerjasama dengan India yang didasarkan kepada kepentingan ekonomi. Akhirnya Cina menyetujui pemimpin Masood Azhar masuk dalam daftar teroris global.

Daftar Pustaka

- Af, Noor. *Al Qaeda dan Jejaringannya*, diakses pada laman : https://eprints.undip.ac.id/59459/3/BAB_II.Pdf. Tanggal 15 Juni 2020
- Economic Times. *US, France, and UK in intense discussions with China on Azhar listing at UN*, diakses pada laman: <https://www.firstpost.com/india/china-puts-indias-bid-to-have-masood-azhar-designated-as-global-terrorist-on-technical-hold-what-does-the-term-mean-6256361.html>. Tanggal 20 Juni 2020.
- Mahendra, Gaur. 2002. *Foreign Policy Annua 2001-2009, Salendra Sengaral*. Kalpaz Publication.
- Nuechterlain, Donal E, 1976. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, Vol. 2, No. 3. British, Cambridge University Press.
- Panda, Ankit. "Jaish E Mohammed Leader's 'Global Terrorist' Designation Is Overdue". *The Diplomat* (online). Diakses pada laman: <https://thediplomat.com/2019/03/jaish-e-mohammed-leaders-global-terrorist-designation-is-overdue/>. Tanggal 20 Juni 2020.
- Resolution 47 (1948) / [adopted by the Security Council at its 286th meeting]*, Terdapat di : <https://digitallibrary.un.org/record/111955>. Tanggal 1 Mei 2020
- Roche, Elizabeth. "China again blocks bid in UN to list Masood Azhar as a global terrorist". *Livemint* (daring). Diakses pada laman: <https://www.livemint.com/Politics/ABEmOW05luaAgJjaVcrfqI/China-says-no-consensus-over-listing-Masood-Azhar-as-global.html>. Tanggal 21 Juni 2020.
- Rahmad Muhammad Iqbal. *Respon pemerintah India pada masa pemerintahan Narendra Modi terhadap kelompok separatis*. Diakses pada laman : <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/994/> Tanggal 1 Mei 2020
- Sitepu, Anthonius P, 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Shadi Khan Saif, *Cina Mengambil Alih Pelabuhan Penting di Pakistan*, diakses pada laman http://kbr.id/mudassar_shah/042013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html. Tanggal 09 Juni 2020

- Scroll In. *Traders burn chinese goods, demands restriction on China*, diakses di : <https://scroll.in/latest/917253/traders-burn-chinese-goods-to-protest-beijings-veto-against-un-blacklisting-of-masood-azhar>. Tanggal 07 Agustus 2020
- The Hindu. “*India in talks with China over repeated blocks in designating Masood Azhar*”. Diakses pada laman: <https://www.thehindu.com/news/national/India-in-talks-with-China-over-repeated-blocks-in-designating-Masood-Azhar/article17242575.ece>. Tanggal 21 Juni 2020
- The Economic Times. “*Chronology of major events leading to Masood Azhar’s designation as global terrorist*”. Diakses pada laman: <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chronology-of-major-events-leading-to-masood-azhars-designation-as-global-terrorist/articleshow/69132448.cms>. Tanggal 21 Juni 2020.
- The Wire. *US Moves Draft Resolution in UNSC to Blacklist JEM Chief Masood Azhar*, diakses pada laman: <https://thewire.in/security/us-moves-draft-resolution-in-uns-c-to-blacklist-jem-chief-masood-azhar>. Tanggal 20 Juni 2020.
- United Nations Security Council, “*Mohammed Masood Azhar Alvi*”. Diakses pada laman: <https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammed-masood-Masood-Azhar-alvi>. Tanggal 21 Juni 2020.
- Virmani Arvind, *India-China Economic Cooperation*, diakses pada laman : <http://prasad.aem.cornell.edu/doc/books/13IndiaChinaEconomicCooperation.pdf> . Tanggal 17 Juni 2020
- Yunanto, S. *Ancaman dan Penanggulangan Terorisme*, diakses pada laman <http://repository.uki.ac.id/872/3/Ancaman%20%26%20Strategi%20Penanggulan%20Terorisme.pdf>. Tanggal 1 Mei 2020.